

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT**

Allysa Aprilia Sunardi

NPP. 29.0625

*Asdaf Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: allysaapriliasunardi@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the entry of Bandung Regency into an extreme poor district as a result of the Covid-19 Pandemic. This has led to a surge in the number of new poor people, thus increasing the poverty rate and the number of KPM PKH in each sub-district, one of which is Ciparay District. Ciparay sub-district is the sub-district with the highest number of KPM PKH in Bandung Regency. **Purpose:** The purpose of this study is to assess the implementation, supporting and inhibiting factors, as well as efforts to overcome the inhibiting factors of Program Keluarga Harapan (PKH) in Ciparay District. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach using the implementation theory of Van Metter and Van Horn (1975). Data collection techniques were carried out by conducting interviews, observations, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author are that there are still KPM PKH who experience delays in receiving the Program Keluarga Harapan funds, PKH membership cards (KKS) have not been distributed to KPM PKH, there are allegations of PKH funding cuts and there is still widespread data on recipients of Program Keluarga Harapan (PKH) that is not appropriate. So that many KPM PKH cannot disburse the social assistance. **Conclusion:** The implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) in Ciparay District has been going well but is not optimal because there are still indicators that have not been maximally achieved, namely basic measures and policy objectives and the lack of communication between organizations and implementation activities. However, the clarity of regulations in the implementation of PKH, the formation of the PPKH organization, the existence of sources of funds and supporting facilities and the tendency of the political elite towards the implementation of PKH are supporting factors in dealing with obstacles related to the lack of understanding and commitment of implementers and the lack of understanding of PKH participants. So that efforts are being made to overcome obstacles, namely by conducting outreach to all PKH components and conducting outreach to all PKH participants through monthly meetings and PKH complaint services.

Keywords: implementation, poverty, Program Keluarga Harapan (PKH)

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan masuknya Kabupaten Bandung kedalam kabupaten miskin ekstrem akibat dari Pandemi Covid-19. Hal tersebut membuat lonjakan jumlah warga miskin baru sehingga angka kemiskinan dan jumlah KPM PKH di setiap kecamatan meningkat, salah satunya adalah Kecamatan Ciparay. Kecamatan Ciparay menjadi kecamatan dengan jumlah KPM PKH tertinggi di Kabupaten Bandung. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dengan menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis yaitu masih ditemukan adanya KPM PKH yang mengalami keterlambatan penerimaan dana Program Keluarga Harapan, kartu anggota PKH (KKS) belum tersalurkan kepada KPM PKH, adanya dugaan pemotongan dana PKH dan masih maraknya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum sesuai sehingga banyak KPM PKH yang tidak bisa mencairkan bantuan sosial tersebut. **Kesimpulan:** Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Ciparay sudah berjalan baik namun belum optimal dikarenakan masih adanya indikator yang belum tercapai maksimal, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan serta kurangnya komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Namun kejelasan peraturan dalam pelaksanaan PKH, sudah terbentuknya organisasi PPKH, adanya sumber dana dan sarana pendukung serta kecenderungan elit politik terhadap pelaksanaan PKH menjadi faktor pendukung dalam menghadapi hambatan terkait kurangnya pemahaman dan komitmen pelaksana dan kurangnya pemahaman peserta PKH. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen PKH serta melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta PKH melalui pertemuan bulanan serta layanan pengaduan PKH.

Kata Kunci: implementasi, kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH)

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya serta pendapatan rata-rata nya dibawah batas minimum (Bhinadi, Ardito : 2017). Hal ini tentunya merupakan permasalahan yang serius yang perlu ditangani oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah perlu melibatkan banyak pihak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai macam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang terus dikaji serta dievaluasi oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah yang konsisten serta tepat sasaran agar program penanggulangan kemiskinan dapat berhasil untuk dilaksanakan.

Pemerintah telah berupaya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut juga telah didukung dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan-peraturan lainnya yang bersifat teknis dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberi bantuan sosial bersyarat kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan. Program ini dilakukan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH sejak tahun 2007. Sebagai sebuah bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama untuk ibu hamil dan anak agar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka (Kemensos : 2021).

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat provinsi. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan Program Keluarga Harapan. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bandung adalah masih ditemukan adanya KPM PKH yang mengalami keterlambatan penerimaan dana Program Keluarga Harapan, kartu anggota PKH (KKS) belum tersalurkan kepada KPM PKH, adanya dugaan pemotongan dana PKH dan masih maraknya data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum sesuai sehingga banyak KPM PKH yang tidak bisa mencairkan bantuan sosial tersebut.

Tentunya kendala tersebut berdampak terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat kecamatan. Salah satu Kecamatan yang terdampak permasalahan PKH adalah Kecamatan Ciparay yang menempati urutan pertama sebagai kecamatan tertinggi tingkat penganggurannya sebagai akibat dari Pandemi *Covid-19* sehingga terdapat banyak warga yang menjadi warga miskin baru. Kemudian Kecamatan Ciparay menjadi kecamatan terbanyak jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) sejumlah 8.837 jiwa di Kabupaten Bandung. Selain itu dalam penyaluran dana PKH, banyak KPM PKH yang mengeluhkan adanya keterlambatan dana, pemotongan dana serta permasalahan lainnya seperti

yang telah disebutkan dalam permasalahan pelaksanaan PKH yang terjadi pada tingkat Kabupaten Bandung. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan terkait dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen pelaksana serta kurangnya pemahaman peserta PKH. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan penerimaan dana, dugaan pemotongan dana serta permasalahan lainnya sehingga dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Oleh karena itu pelaksanaan PKH menjadi salah satu tugas yang penting bagi pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari adanya penelitian terdahulu, baik dalam konteks efektivitas maupun implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian Rizki Rigeras Aldzuhri yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga harapan (PKH) dalam Upaya pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pada kategori efektif dengan total skor 4806 yang didapatkan dari perhitungan rumus rentang skala. Kendala yang dihadapi adalah masih ditemukan sebagian kecil KPM PKH yang menggunakan dana bantuan PKH dengan kurang bijak atau kurang produktif dan masih terdapat sebagian KPM PKH yang masih memandang persoalan pendidikan dan kesehatan dengan sebelah mata. Maka solusi yang direkomendasikan adalah perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus agar timbul kesadaran KPM PKH untuk menggunakan dana bantuan PKH dengan bijak dan produktif serta perlu dilakukan penegasan terhadap aturan atau sanksi yang diberikan kepada KPM PKH yang tidak menjalankan kewajiban dan komitmennya. (Aldzuhri. R. R : 2021).

Penelitian Prisca Lucia dengan judul penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara belum sepenuhnya efektif yang dibuktikan pada beberapa indikator yang diteliti, antara lain standar dan sasaran, kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas pelaksanaan serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Proses pelaksanaan yang optimal terdapat pada standar dan kebijakan, sikap pelaksana, penguatan aktivitas pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik, sedangkan indikator sumber daya masih memerlukan perbaikan baik dalam hal sumber daya manusia yang kurang dikarenakan pendamping PKH mendampingi lebih dari 300 KPM PKH dan sumber daya finansial yang sangat kurang sehingga berpengaruh terhadap pengimplementasian PKH di Kecamatan Watunohu (Lucya. P : 2020).

Penelitian Claudio Usman dengan judul penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, akibat dari program yang masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini fektivitas program keluarga harapan berpengaruh secara signifikan dalam menanggulangi kemiskinan, berdasarkan hasil penelitian yang diteliti dilapangan (Usman. C : 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada lokasi penelitian, metode penelitian dan teori yang digunakan. Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dimana dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn (1975). Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori yang berbeda, metode penelitian yang berbeda yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif serta memiliki lokasi penelitian yang berbeda juga yaitu di masing-masing daerah di wilayah Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara dan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menyajikan informasi yang jelas tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, dengan pendekatan induktif.

Penelitian ini dilakukan langsung ke sumber data dan instrumen kuncinya yaitu penulis itu sendiri. Data yang terkumpul berupa gambar dan kata-kata, sehingga lebih mengarah ke deskriptif. Lebih menekankan pada proses daripada hasil. Serta melakukan analisis data secara induktif. (Sugiyono, 2013)

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap 22 orang informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling dan snowball sampling* yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Bandung, Camat Ciparay, Pengelola Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ciparay, Kepala Desa sebanyak 3 orang, Peserta PKH sebanyak 10 orang dan Pendamping PKH sebanyak 5 orang.

Teori yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Terdapat enam dimensi yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan implementor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori dari Van Metter dan Van Horn yang terdiri atas enam dimensi yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber, komunikasi antar organisasi

dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan implementor. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

3.1 Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2016:135) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu atau pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Terdapat enam dimensi yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber-sumber, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan implementor.

3.1.1 Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay telah memiliki tujuan dan standar yang ditetapkan dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. Setiap tahunnya kebijakan penyaluran PKH berbeda-beda namun tetap merujuk kepada Permensos Nomor 1 Tahun 2018. Hal tersebut menyebabkan kesalahpahaman antara pendamping PKH dengan KPM PKH dikarenakan keterlambatan informasi yang diterima oleh KPM PKH terkait kebijakan baru tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay dalam dimensi ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah berjalan dengan baik namun belum optimal. Sehingga perlu dioptimalkan dengan menciptakan koordinasi yang baik antara implementor dengan peserta PKH agar tidak menyebabkan kesalahpahaman serta agar tersampainya segala kebijakan terbaru terkait penyaluran PKH kepada masyarakat.

3.1.2 Sumber-Sumber

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay telah memenuhi dimensi sumber-sumber dari teori van metter dan van horn dapat dibuktikan bahwa sumber dana insentif diperoleh dari APBD Kabupaten Bandung dimana lima persen dari APBD Kabupaten Bandung dipergunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan PKH. Tak hanya menjadi dana insentif atau perangsang, dana tersebut juga dipergunakan dalam mendukung kegiatan PKH, seperti penyediaan kantor sekretariat PKH serta fasilitas yang ada didalamnya. Selain itu dana insentif juga

dipergunakan guna meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Hal tersebut dilakukan guna tercapainya keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta mendukung segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

3.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay belum memenuhi dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa terdapat kurangnya pemahaman tentang komponen penerima bantuan PKH yang masih terjadi terutama di kalangan *stakeholders* tingkat bawah padahal *stakeholders* tingkat bawah merupakan pihak pelaksana terdekat dengan KPM PKH yang sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi PKH di Kecamatan Ciparay. Selain itu sering terjadinya *miss communication* antara pelaksana Program Keluarga Harapan, walaupun hanya sebagian oknum pendamping PKH saja yang kurang dalam hal komunikasi antar organisasi dan pelaksana namun tetap saja jika dibiarkan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program yang membuat tidak tercapainya tujuan. Sehingga perlu adanya suatu pemahaman tentang kebijakan PKH karena hal tersebut merupakan hal vital yang harus dilaksanakan. Komunikasi yang baik juga sangat penting agar dapat mencapai kejelasan standar dan tujuan kebijakan, selain itu akurasi komunikasi yang diberikan, konsistensi atau keseragaman pemahaman informasi sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

3.1.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Badan pelaksana atau PPKH di Kabupaten Bandung sudah menjalankan kebijakannya dengan baik. Keahlian PPKH dalam melaksanakan kebijakan tersebut ke masyarakat membawa pelaksanaan Program Keluarga Harapan menuju keberhasilan. PPKH beserta *stakeholder* di tingkat Kabupaten Bandung juga sangat antusias untuk turut membantu mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bandung dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

3.1.5 Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay ini sudah kondusif. Dalam kondisi lingkungan ekonomi di Kecamatan Ciparay yang mayoritas profesi penduduknya adalah bertani dan bercocok tanam, bantuan PKH ini sangat membantu meringankan beban hidup keluarga miskin untuk mencapai keluarga sejahtera yang diharapkan. Dalam lingkungan sosial pun sudah kondusif, KPM PKH sudah aktif dalam memeriksakan dirinya ke layanan kesehatan terdekat, selain itu komponen PKH yang masih menjadi siswa sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA serta ibu hamil maupun komponen lainnya sudah paham terkait kewajibannya sebagai KPM PKH tidak hanya menuntut haknya saja, sehingga bantuan PKH tersebut tepat sasaran untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam lingkungan politik pun sama sudah kondusif. Kondisi elit politik di Kabupaten Bandung terhadap PKH dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PKH baik berupa dana bantuan maupun berupa mekanisme koordinasi pelaksanaan PKH antar *stakeholders*.

3.1.6 Kecenderungan Para Pelaksana

Kecenderungan para pelaksana dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ciparay ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sudah pahamnya pendamping PKH terkait mekanisme pelaksanaan PKH. Tentunya Kecenderungan para pelaksana program keluarga harapan di Kabupaten Bandung, khususnya di Kecamatan Ciparay sudah tercipta, dikarenakan para pelaksana program memiliki jiwa integritas dan komitmen yang tinggi walaupun ada beberapa oknum pendamping PKH yang terkadang semangat dan motivasinya turun namun hal tersebut bukan menjadi penghalang. Semua dilakukan demi tujuan akhir dari program keluarga harapan, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan dan pendidikan RTSM sehingga angka kemiskinan dapat menurun.

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

3.2.1 Faktor Pendukung Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

3.2.1.1 Kejelasan Peraturan dalam Pelaksanaan PKH

Adanya pedoman atau peraturan yang baku terkait pelaksanaan program keluarga harapan merupakan salah satu pendukung dalam implementasi program ini. Dengan adanya peraturan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan PKH sehingga tujuan PKH dapat mudah untuk tercapai.

3.2.1.2 Sudah Terbentuknya Organisasi Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH)

Kabupaten Bandung memiliki PPKH yang bertugas khusus menangani dan melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan PKH dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal tersebut membantu dan mempermudah teknis pelaksanaan kebijakan PKH di lapangan. Dengan terbentuknya organisasi Pelaksana Program keluarga Harapan (PPKH) dimana PPKH merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Sosial, tentunya dapat mempermudah dalam pengawasan penyaluran dana PKH, karena PPKH ini merupakan organisasi khusus yang berfokus kepada Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya PPKH ini dapat membantu Dinas Sosial dalam berkoordinasi dengan pendamping PKH serta peserta PKH.

3.2.1.3 Tersedianya Sumber Dana dan Sarana Pendukung

Sumber daya yang dibutuhkan pelaksana dalam implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal ini yaitu oleh PPKH Kabupaten Bandung dapat dikatakan cukup memadai, dilihat dari sumber daya manusia yang terdapat dalam struktur organisasi PPKH Kabupaten Bandung dapat dikatakan telah memenuhi kebutuhan yang ada, serta fasilitas lain yang ada di sekretariat PPKH Kabupaten Bandung seperti kantor, komputer, ATK, dan fasilitas lainnya merupakan fasilitas yang bersumber dari rangsangan dana insentif untuk mendukung program yang diberikan oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

3.2.1.4 Kecenderungan Elit Politik terhadap Pelaksanaan PKH

Kondisi elit politik di Kabupaten Bandung terhadap PKH dapat dikatakan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari dukungan yang diberikan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PKH baik berupa dana bantuan maupun berupa mekanisme koordinasi pelaksanaan PKH antar *stakeholders*.

3.2.2 Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

3.2.2.1 Kurangnya Pemahaman dan Komitmen Pelaksana

Komitmen pelaksana dalam melaksanakan khususnya para pendamping PKH masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan PKH terutama dalam koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* tingkat bawah. Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Ciparay tidak seluruhnya berjalan dengan baik, ada desa yang pendamping PKH nya tidak melaksanakan komitmen dengan baik seperti pelaksanaan pertemuan setiap bulannya sehingga pengawasan dan peningkatan pemahaman kepada peserta PKH tidak berjalan dengan baik.

3.2.2.2 Kurangnya Pemahaman Peserta PKH

Kesadaran peserta PKH dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah dan belum menjadi kebiasaan baik serta masih terdapat oknum dari peserta PKH yang kurang memenuhi kewajibannya namun terus menuntut haknya.

3.3 Upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Sosialisasi merupakan langkah penting untuk memberikan informasi dan sarana bertukar pikiran antar komponen pelaksana PKH. Disini pentingnya sosialisasi kepada pelaksana PKH digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaksana PKH. Selain itu dalam sosialisasi juga diadakan perkumpulan untuk mengevaluasi kinerja pendamping PKH sebagai upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaksana PKH khususnya para pendamping PKH dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

3.3.2 Melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta PKH melalui pertemuan bulanan serta layanan pengaduan PKH

Sosialisasi juga diperuntukkan kepada para KPM PKH agar dana PKH tersebut digunakan secara tepat sasaran. Selain itu perlu adanya pemantauan sebagai upaya untuk memantau jalannya kebijakan PKH yang telah dilaksanakan. Kemudian PPKH Kabupaten Bandung membuka layanan pengaduan PKH bagi seluruh peserta PKH Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar PPKH

Kabupaten dapat menerima dan mengetahui secara langsung permasalahan serta kendala yang terjadi dikalangan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan banyak sekali manfaat kepada para KPM PKH dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa ketergantungan dengan bantuan sosial tersebut. Program ini juga merupakan program pengentasan kemiskinan yang sudah lama berlangsung di Indonesia dan dinilai berjalan dengan baik dan mampu menurunkan angka kemiskinan sedikit demi sedikit. Penulis menemukan temuan penting yaitu kesadaran dan komitmen dari KPM PKH sangat diperlukan agar dana PKH digunakan secara tepat sasaran. Sama halnya dengan temuan Rizki Rigeras bahwa memang kendala yang dihadapi adalah masih ditemukannya sebagian kecil KPM PKH yang menggunakan dana bantuan PKH dengan kurang bijak atau kurang produktif (Aldzuhri. R. R : 2021).

Layaknya dalam pelaksanaan program lainnya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga masih memiliki beberapa kekurangan salah satunya dalam komunikasi antar organisasi PKH di Kecamatan Ciparay dinilai belum maksimal, salah satunya dikarenakan oleh faktor egoisme individu serta kurangnya pemahaman dan komitmen dari para pelaksana PKH, layaknya temuan Prisca Lucya (Lucya. P : 2020).

Selain itu Program Keluarga Harapan dapat dikatakan optimal jika dapat membantu keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Sama halnya temuan penulis dengan penelitian dari Usman bahwa belum optimalnya Program Keluarga Harapan karena masih belum tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan masih belum berjalan sebagaimana mestinya program ini (Usman. C : 2020).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ini secara umum sudah berjalan baik namun belum optimal. Melihat masih adanya indikator yang belum tercapai maksimal, yaitu ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan serta kurangnya komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya pemahaman dan komitmen pelaksana dan kurangnya pemahaman peserta PKH.

Adapun faktor pendukung berupa ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang PKH sudah jelas, organisasi pelaksana PKH sudah terbentuk dengan baik, adanya sumber dana *sharing* serta penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung PKH dan mendapatkan dukungan dari elit politik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen PKH serta melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta PKH melalui pertemuan bulanan serta layanan pengaduan PKH.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan utama pada penelitian ini, yaitu waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih awal. Sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung beserta jajarannya, Camat Ciparay beserta jajarannya yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bessant, Judith. 2006. *Talking Policy; How Social Policy in Made*. Crows Nest: Allen and Unwin

Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.

Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy: Teori kebijakan analisis kebijakan proses kebijakan perumusan , implementasi, evaluasi, revisi risk management dalam kebijakan publik kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan publik : Teori , proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021*. Jakarta : Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial RI: Kementerian Sosial RI

B. KARYA ILMIAH

Aldzuhri, R.R. 2021. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019*. (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2021)

<http://repository.upstegal.ac.id/3187/>

Lucya, P. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020)

<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1268/>

Usman, C. 2020. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo)*. (Artikel, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2020)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/issue/view/659>

C. INTERNET

Ayobandung.com (2021, 27 Agustus) *Mensos Risma marah Ribuan Kartu PKH Kabupaten Bandung Belum Didistribusi*. Diakses pada 22 September 2021, dari <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-79978764/mensos-risma-marah-ribuan-kartu-pkh-kabupaten-bandung-belum-didistribusi?page=all>

Jabar.idntimes.com (2021, 27 Agustus). *Ribuan Paket Bansos di Kab. Bandung Gagal Disalurkan, BNI Disalahkan*.

https://jabar.idntimes.com/news/jabar/aris-darussalam/ribuan_paket-bansos-di-kab-bandung-gagal-disalurkan-bni-disalahkan/3

News.detik.com (2021, 21 juni). *Bantuan PPKM Belum Optimal, Bupati Bandung Sentil Dinas Sosial*. Diakses pada 13 Agustus 2021, dari

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5614820/bantuan_ppkm-belum-optimal-bupati-bandung-sentil-dinas-sosial